

Strategi Mengembangkan Perekonomian Desa melalui Penguatan Usaha BUMDES Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupert

Mulyadi^{1*}, Rinah², Safriadi³, Nur Azzatul Azura⁴, Sindi Darma Fitri⁵, Nurul Izzati⁶, Nurul Ainni⁷, Erzuraidah⁸, Zainudin⁹

^{1,3,4,5,6,7,8,9} STIE Syariah Bengkalis, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru, Indonesia

*Corresponding Author: mulyadi@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to increase the capacity of the bumdes business through improving business management and initiating the establishment of new businesses. This study uses a qualitative descriptive research method that is useful for providing a detailed description of the Strategy for Developing the Village Economy through Strengthening the Bumdes Business Unit for Savings and Loans (U-USP) in Parit Kebumen Village, Rupert District. The results of the research. Community empowerment in developing the economy in Parit Kebumen Village is going pretty well, indicated by the existence of MSMEs in Parit Kebumen Village such as Handicraft Businesses, stalls, Shrimp Ponds, Rubber, Oil Palm, Coconut, Tofu, Tempe and public knowledge about MSMEs at this time do not fully know because the village community opens a business only to meet the daily needs of the Parit Kebumen village community and needs to be considered in managing MSMEs starting from aspects of financial management, human resources, operations and marketing.

Keywords: Economy, Bumdes Business Savings and Loans Business Unit (U-USP)

PENDAHULUAN

Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada, terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi local dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya (Nurchaya, 2019). Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal (Arindhawati & Utami, 2020). BUMDes sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukan kepada masyarakat.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 213 ayat 1-3 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sesuai dengan aturan tersebut, pembentukan BUMDes didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa, dengan tujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat desa, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif (Karim, 2019). Hal yang paling penting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri. Dengan demikian, bangun BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokalitas termasuk ciri sosial budaya masyarakat.

Melihat posisi BUMDes dalam menghadapi realitas desakan arus intervensi modal domestik dan asing yang kini menjadikan desa sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, disamping itu BUMDes ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta yang selalu bermodal besar. Dengan sumber daya alam yang dimiliki desa, hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran BUMDes sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Diharapkan BUMDes ini mampu menggerakkan dinamika ekonomi desa, dan sebagai perusahaan milik desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berguna untuk memberi gambaran rinci mengenai Strategi Mengembangkan Perekonomian Desa Melalui

Penguatan Usaha Bumdes Unit Usaha Simpan Pinjam (U-USP) di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi dan observasi secara terus-menerus. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, A. Bryne mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan (Satria & Untari, 2022). Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha BumDes melalui peningkatan pengelolaan usaha dan inisiasi pendirian usaha baru. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program adalah *Focus Group Discussion* (FGD), penyuluhan (ceramah dan diskusi), pelatihan, implementasi, monitoring, dan kapasitas ini berupa meningkatkan wawasan pengembangan usaha dan administrasi keuangan/pembukuan, standar kerja, melakukan pelatihan penyusunan laporan keuangan bumdesa yang benar, dan menciptakan produk yang bisa dipasarkan sehingga bisa menjadi produk unggulan di Desa Parit Kebumen (Rupal).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam penulisan mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada didalam penelitian. Badan Usaha Milik Desa yang singkat menjadi BUMDes merupakan suatu lembaga atau usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Definisi BUMDes Menurut Jaryono, J., & Tohir, T. (2019) bahwa "BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa". Jadi, BUMDes merupakan suatu usaha atau lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi peluang usaha, menambah

wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) desa serta mengoptimalkan sumber daya manusia (Warga Desa) (Sulaiman et al, 2021). UU No. 6 Tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara substansial, UU.No. 6 Tahun 2014 menggerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan. Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa memang sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah (Yudiardi & Hasyim, 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. UMKM memiliki undang-undang tersendiri. UU.No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UU. Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikri, kecil, dan menengah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 04 Juli 2008 di Jakarta. Undang-undang 20/2008 tentang UMKM diundangkan dalam lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 No. 93 dan penjelasan atas UU.Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 04 Juli tahun 2008 di Jakarta (Anggriani et al, 2020).

Pengertian Perekonomian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekonomi desa adalah ekonomi yang berdasarkan hasil produksi dari daerah pedesaan yang biasanya bersifat tradisional (Malik et al, 2018). Hasil produksi dari pedesaan umumnya berupa hasil pertanian bagi lokasi desa yang berada di daratan dan berupa hasil kelautan bagi lokasi desa yang berada di pesisir pantai. Semua hasil produksi nantinya bertujuan untuk membangun perekonomian pedesaan. Di era modern, hasil produksi dari pedesaan tidak hanya terbatas pada sektor pertanian dan kelautan. Melainkan dapat berupa hasil keterampilan dalam mengubah benda yang bersifat tradisional menjadi barang yang memiliki nilai jual yang tinggi. Contohnya adalah tempurung kelapa yang dahulu hanya dijadikan bahan bakar

tradisional, kini dapat menjadi hiasan di rumah yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pengertian ekonomi desa adalah kegiatan, konsumsi, produksi, dan penanaman modal pada masyarakat pedesaan yang ditentukan oleh keluarga secara bersamaan. Setiap anggota keluarga yang sudah dewasa, memberikan sumbangan bagi pendapatan keluarga. Inti potongan kalimat dari undang-undang tersebut adalah menjelaskan tentang roda perekonomian desa yang berasal dari tiap keluarga. Maksudnya, Kegiatan perekonomian pada kalangan masyarakat pedesaan memiliki tujuan untuk mensejahterahkan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan yang mengandung prinsip ekonomi semua berawal dari lingkup keluarga, dan akhirnya dapat meluas di kalangan yang bukan dari anggota keluarga. Seperti pedagang, kalangan pemerintah, hingga kalangan pekerja pabrik, dan lain sebagainya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Perekonomian Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perekonomian terdapat 6 hal yang haru di perhatikan sebagai berikut (Raharti et al, 2020): 1) Sumber Daya Manusia SDM Merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas manusia sebagai objek dan subjeknya; 2) Sumber Daya Alam SDA meliputi tanah, dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, hasil hutan, tambang dan laut, terutama dalam penyediaan bahan baku produksi; 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iptek merupakan alat bagi sumber untuk mengolah sumber daya alam sebagai nahan produktif; 4) Sosial Budaya Nilai-nilai sosoal budaya dapat menjadi pendorong dan penghambat dalam peningkatan ekonomi, sehingga soaial budaya merupakan suatu hal mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi suatu desa; 5) Keadaan Politik Suatu sistem politik dalam suatu negar berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di wilayahnya yang menjangkau perekonomian di desa; dan 6) Sistem Pemerintahan Pemerintah dengan sistem sosialis dan liberalis akan memberikan warna dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Sedangkan menurut Suswita et al (2020) terdapat suatu strategi dalam membangun atau meningkatkan perekonomian masyarakat, yang diantaranya sebagai berikut: 1) Pembangunan pertanian sampai saat ini sektor pertanian masih berperan penting dalam pembangunan ekonmi dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada tiga aspek pembangunan ekonomi yang memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian terutama di daerah pedesaan, ketiga aspek tersebut meliputi revolusi teknologi pertanian, pembangunan irigasi, serta pembangunan pertanian di luar Jawa dengan pola transmigrasi; 2) Pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi)

merupakan strategi pemerintah yang cukup penting dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia; dan 3) Peranan lembaga swadaya masyarakat LSM memiliki peran dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan dengan strategi yang baik dalam meningkatkan perekonomian.

Adapun bentuk organisasi dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam 4 kategori: 1) Lembaga swadaya Masyarakat; 2) Lembaga pembina swadaya masyarakat; 3) Organisasi sosial lainnya; dan 4) Organisasi semi pemerintah (Riyadi, 2021). Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di Desa Parit Kebumen berjalan lumayan baik di tandakan dengan adanya usaha-usaha kecil seperti usaha Kopi.

Penanaman Toga

Kegiatan	: Penanaman Tanaman-tanaman obat
Sasaran	: PKK
Jumlah Sasaran	: 10 Orang
Waktu	: 17 Juli – 18 Juli 2019
Sumber dana	: Rp. 70.000,-

Setelah beberapa lama PKK yang ada di desa vakum karena Parit Kebumen PKK yang ada di Desa Parit Kebumen kurang baik di bidang manajemennya. Sehingga PKK yang ada di desa Parit Kebumen itu vakum. sedangkan PKK itu bisa menambahkan perekonomian. pengurus PKK mengeluhkan persoalan pendapatan yang kurang adil bagi pengelolanya. kami menghidupkan kembali taman PKK yang telah vakum dengan menanam beberapa tanaman herbal seperti serai, kunyit Putih, Kunyit Kuning, kencur, laos, jahe, Lempuyang, Sambung Nyawa, Kumis Kucing, Sirih, Lidah Buaya. Kami pun turut membantu dalam menyediakan sarana mediasi antara pimpinan PKK dengan pengelola PKK, hingga memberikan binaan tentang proporsi bagi hasil taman PKK yang adil agar para pengelolanya mau mengoperasikan kembali fungsi taman PKK, dan itu cukup berhasil ditandai dengan mulai adanya rutinitas para pengelola PKK dalam mengelola kebun secara bertahap. Penanaman ini dilakukan sesama anak KKM.

Faktor Pendorong Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

Beberapa program yang direncanakan dapat terlaksana dan dilaksanakan dengan berhasil tanpa mengalami hambatan. Keberhasilan melaksanakan program kegiatan tersebut karna didorong atau didukung oleh beberapa faktor yang turut menentukan keberhasilan kegiatan dilapangan, faktor-faktor yang mendorong tersebut adalah:

Pertama, kerjasama kelompok. Dengan jumlah anggota 7 orang dan dengan jurusan yang berbeda tidak menjadi hambatan dalam berkerjasama. Justru secara bersama-sama menentukan kegiatan atau program kerja dapat terlaksanakan dengan baik. Semua berkat kekompakan dan kerjasama yang solid serta saling terbuka dan semua keputusan diambil berdasarkan mufakat dengan jalannya musyawarah. *Kedua*, dukungan aparaturnya desa. Dukungan Aparatur, warga dan

tokoh-tokoh masyarakat dalam Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa STIE Syariah tahun 2021 di Desa Parit Kebumen Kecamatan rupa Kabupaten Bengkalis merupakan faktor yang cukup dominan dalam menentukan beberapa keberhasilan dalam melaksanakan beberapa kegiatan kami dilapangan. Dukungan aparatur pemerintahan Desa Parit Kebumen merupakan akses dan pintu utama bagi kami dalam menjalankan kegiatan di Desa Parit Kebumen, karna berkat dukungan aparatur pemerintahan desa sebagai pihak berwenang yang memberikan status legalitaas pada kegiatan yang kami laksanakan di Desa.

Ketiga, dukungan masyarakat. Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa STIE Syariah Bengkalis tahun 2021 di Desa Parit Kebumen Kabupaten Bengkalis dalam merencanakan dan melaksanakan program kerjanya terbatas perannya sebagai konseptor dan fasilitator serta masyarakatlah yang diutamakan karena masyarakat setempat lebih mengenal dan mengetahui akan kebutuhannya. Dan program kerja dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhannya. Dan semua program kerja dapat terlaksana sesuai dukungan dan peran serta masyarakat secara langsung pada kegiatan KKM di Desa Parit Kebumen. Para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat serta mahasiswa berkerja secara bersama-sama dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakannya sehingga program kerja yang kami rencanakan dan jalankan merupakan kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan dan diikuti oleh masyarakat Desa.

Faktor Penghambat Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiwa (KKM)

Namun pada beberapa program kerja yang dapat terselenggara dengan baik dan berhasil, adapula beberapa program kerja yang tidak dapat kami laksanakan atau terhambat pada pelaksanaannya. Semua terhambat karena beberapa faktor yakni:

Pertama, informasi. Dikarenakan mahasiswa ditempatkan di Desa Parit Kebumen selama 25 Hari yakni 27 Juli sampai 20 Agustus 2021. mahasiswa KKM dan masyarakat sulit untuk bertukar informasi. Akibatnya, apabila mahasiswa mengadakan kegiatan masyarakat kesusahan mendapatkan informasi yang akurat tentang jadwal kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKM dan masyarakat banyak tidak hadir pada saat diadakannya kegiatan. *Kedua*, *mindset* masyarakat. *Mindset* masyarakat yang masih Rendah sehingga iya berpikir bahwa pendidikan kurang penting bagi masyarakat pendesaan merupakan faktor penghambat, karena pada saat mahasiswa ingin mengadakan seminar masyarakat tidak menganggap bahwa kegiatan tersebut penting bagi mereka. *Ketiga*, kesesuaian pembiayaan. Dalam melaksanakan kegiatan, biaya yang digunakan semaksimal mungkin disesuaikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hanya saja ada kebutuhan tak terduga diluar apa yang telah direncanakan sebelumnya, namun kebutuhan tersebut dibebankan pada kas kelompok. Sehingga antara pembiayaan pelaksanaan biaya yang telah direncanakan terjadi kesesuaian.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di Desa Parit Kebumen berjalan lumayan baik di tandakan dengan adanya UMKM di Desa Parit Kebumen seperti Usaha Kerajinan Tangan, warung, Tambak Udang, Karet, Sawit, Kelapa, Tahu, Tempe akan Pengetahuan masyarakat mengenai UMKM pada saat ini belum sepenuhnya mengetahui karena masyarakat desa membuka usaha hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk masyarakat desa Parit Kebumen saja dan perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM mulai dari aspek pengelolaan keuangan, SDM, operasional dan pemasaran.

REFERENSI

- Anggriani, I. V., Triandani, S., & Ardiani, F. (2020). Keringanan Pembayaran Pajak di Masa Pandemi Covid-19 bagi Wajib Pajak Khusus UMKM. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 1(2), 137-152.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43-55.
- Jaryono, J., & Tohir, T. (2019). Analisis Kinerja BUMDes "Mitra Usaha Makmur" dalam Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1).
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Nas Media Pustaka, Makassar*.
- Malik, M. K., Wahyuni, S., & Widodo, J. (2018). Sistem bagi hasil petani penyakap di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(1), 26-32.
- Nurchaya, E. (2019). Tugas Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah–Masalah Sosial: Tinjauan Mengenai Masalah Badan Usaha Milik Desa. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1-7.
- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam)(Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, 6(1), 36-53.
- Riyadi, A. (2021). *Kemitraan Antara CV Tani Organik Merapi (Tom) dengan Kelompok Tani Tani Organik Merapi di Cangkringan Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta).

- Satria, B., & Untari, D. T. (2022). Strategi Bisnis Online di Bekasi; Kasus Pada Bisnis Cloting Line. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, 18(1), 23-27.
- Sulaiman, R., Sugihartono, T., & Raya, A. M. (2021). Pelatihan Keterampilan Speadsheet pada Pelaku Industri Rumahan pada Bumdes di Desa Teru. *Jurnal Abdimastek (Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi)*, 2(2), 23-26.
- Suswita, I., Damanik, D., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 1-11.
- Yudiardi, D., & Hasyim, S. B. (2020). Sosialisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cisangkal Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. *Budaya dan Masyarakat*, 1(1), 16-19.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2022 Mulyadi, Rinah, Safriadi, Nur Azzatul Azura, Sindi Darma Fit Nurul Izzati, Nurul Ainni, Erzuraidah, Zainudin

Published by Lembaga Anotero Scientific Pekanbaru